BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah KKL

Reformasi telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yang tadinya sangat terbatas oleh pengaruh kekuasaan yang terlalu membatasi ruang gerak masyarakat Indonesia. Dengan lahirnya reformasi telah mendorong masyarakat Indonesia lebih leluasa dalam mengembangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Reformasi juga telah mendorong adanya perubahan dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, yang tadinya bersifat sentralisasi atau terpusat sekarang berubah. Hubungan itu menjadi desentralisasi atau kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam lebih optimal dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desentralisasi telah melahirkan adanya otonomi daerah. Dengan lahirnya otonomi daerah, setiap daerah dibagi kedalam beberapa wilayah yang meliputi wilayah provinsi, kabupaten dan kota. Peran pemerintah daerah sangat penting dalam menciptakan iklim pemerintahan daerah yang lebih maju dan mampu menghasilkan pembangunan yang merata, luas dan bertanggung jawab. Pada era otonomi setiap daerah harus berusaha menggali potensi yang dimiliki daerah. sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang No 32 tahun 2004 tentang penyelenggaran pemerintahan daerah. Undang-undang 32 Tahun 2004

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

mengisyaratkan bagi setiap daerah untuk bekerja lebih. Dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih efisien dan efektif serta memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah agar tercipta kondisi yang harmonis antar pemerintahan.

Otonomi daerah dapat terlaksana sesuai dengan tujuan, sehingga kepada daerah perlu diberikan wewenang-wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penerapan otonomi daerah telah membuka peluang bagi daerah provinsi, daerah kabupaten atau kota untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam membangun daerah sehingga tercipta kondisi masyarakat lebih maju dan sejahtera.

Kota Dumai dalam mengembangkan potensi yang dimiliki daerah baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia, perlu didukung dengan penggunaan teknologi dan informasi yang lebih kompetitif dalam menjalankan roda pemerintahan di Dumai. Dalam mewujudkan pembangunan bidang teknologi informasi Kota Dumai menjawab tantangan tersebut dengan didukung banyaknya institsusi pengembangan di bidang teknologi dan informasi.

Kemajuan teknologi dan informasi pemerintah Kota Dumai, dapat dilihat dalam mengembangkan dan menerapkan organisasi pemerintahan yaitu dengan menerapkan konsep teknologi pemerintahan atau yang sering disebut *E-Government.* Penerapan *E-Government* merupakan

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

salah satu bentuk usaha yang dilakukan pemerintah Kota Dumai, dalam menjalankan aktivitas pemerintahannya yang lebih efektif dan efisisen. Kemajuan teknologi dan informasi tersebut diaplikasikan dalam bentuk *E-Government.*

Kota Dumai menerapkan aplikasi *E-Government* bertujuan untuk mendekatkan antara pejabat dengan rakyatnya. *Accses point*, sebagai salah satu upaya pemerintah Kota Dumai dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah Kota Dumai tahun 2010. *E-Government* adalah istilah yang sangat populer saat ini, dimana secara umum *elektronik Government* adalah upaya mengaplikasikan pelayanaan kepemerintahan melalui sistem informasi berbasis komputer. Salah satu bentuk upaya Pemerintah Kota Dumai, dalam meningkatkan kinerja aparatur pegawai yaitu melalui Dinas Kependudukan Kota Dumai. Membangun *web service* kependudukan yang merupakan penunjang pelaksanaan *E-Government.*

Berdasarkan Undang-Undang NO. 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1974 Tentang pokok-pokok kepegawaian, khususnya pasal 43 ayat (2). Menyatakan perlunya penyelenggaraan dan pemeliharaan informasi kepegawaian. Untuk menunjang kebijakan tersebut maka pemerintah Kota Dumai, melalui Dinas Kependudukan membangun w*eb service*. *Web service* ini diharapkan dapat mempermudah mendapatkan informasi data kependudukan bagi pegawai negeri sipil dan masyarakat di daerah.

Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah. Sangat tergantung pada kinerja pegawai, karena

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

merupakan unsur aparatur yang langsung bertugas melayani masyarakat. Informasi yang disajikan melalui *web service*, merupakan salah satu upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Dumai, dalam meningkatkan kinerja pegawai. Informasi kependudukan melalui *web service* ini diharapkan dapat memberi kemudahan dalam menjalankan tugas kependudukan.

Web service Dinas Kependudukan memuat berbagai informasi tentang kependudukan yang meliputi, setiap instansi perlu meningkatkan kinerja karena merupakan salah satu faktor dalam menentukan keberhasilan pemberdayaan aparatur pemerintahan. Kinerja pegawai sangat diperlukan terutama dalam Penerapan teknologi dan informasi pemerintahan atau yang dikenal *E-Government.* Salah satu bentuk pembangunan *E-Government* adalah dengan dibangunya *web service* biro kependudukan akan tetapi *web service* ini masih mengalami berbagai kendala.

Permasalahan yang sering muncul dalam penerapan *web service* tidak selalu diiringi dengan ketidak-siapan aparatur pemerintah dan kurangnya sumber daya yang dimiliki oleh setiap lembaga pemerintah. Kekurangsiapan ini selalu menjadi kendala dalam praktik penyelenggaraan dalam menjalankan kinerja pegawai dan masih belum tersedianya fasilitas komputer dengan teknologi internet di setiap lembaga pemerintahan. Akibatnya dalam proses penyampaian informasinya masih manual dan mengharuskan setiap pegawai turun langsung ke daerah untuk memberikan informasi kependudukan.

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Kinerja aparatur dalam memberikan informasi kependudukan melalui *web service* diharapkan lebih optimal dan terkoordinir dengan baik sehingga pencapaian visi dan misi kota Dumai dapat tercapai. Kinerja aparatur dalam memberikan informasi tentang kependudukan diharapkan dapat memberi kemudahan dan percepatan dalam pemprosesan data yang disajikan. Hal ini tentunya akan berdampak pada peningkatan kinerja aparatur pemerintah, terutama pada aparatur pemerintahan di daerah dan masyarakatpun dapat mengetahui informasi kependudukan di lingkungan pemerintah Kota Dumai. Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengambil judul **"IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) DALAM PEMBUATAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA DUMAI".**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah laporan KKL diatas, maka untuk mempermudah arah dan proses pembahasan, penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kualitas pelayanan Informasi Kependudukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam Pembuatan Dokumen Kependudukan di Kota Dumai?

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2. Bagaimana indikator kinerja aparatur di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam pembuatan Dokumen Kependudukan di Kota Dumai?
3. Bagaimana pengelolaan Informasi Kependudukan dan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan aparatur di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam pembuatan Dokumen Kependudukan di Kota Dumai ?

1.3 Maksud dan Tujuan KKL

Maksud dari Laporan Kuliah Kerja Lapangan ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana kinerja aparatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam pembuatan Dokumen Kependudukan di Kota Dumai dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Untuk mengetahui kualitas pelayanan Informasi Kependudukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam Pembuatan Dokumen Kependudukan di Kota Dumai.
2. Untuk mengetahui indikator kinerja aparatur di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam pembuatan Dokumen Kependudukan di Kota Dumai.
3. Untuk mengetahui pengelolaan Informasi Kependudukan dan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

aparatur di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam pembuatan Dokumen Kependudukan di Kota Dumai.

1.4 Kegunaan Laporan KKL

Hasil Laporan Kuliah Kerja Lapangan ini diharapkan memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis, sebagai berikut :

1. Bagi kepentingan penulis, Laporan Kuliah Kerja Lapangan ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai kinerja aparatur pemerintah daerah dalam menerapkan *E-Government* yang diimplementasikan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai.
2. Secara teoritis, Laporan Kuliah Kerja Lapangan ini untuk mengembangkan teori-teori yang penulis gunakan yang relevan dengan permasalahan Laporan Kuliah Kerja Lapangan ini dan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan dalam pelaksanaan *E-Government.*
3. Secara praktis, diharapkan Laporan Kuliah Kerja Lapangan ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah khususnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Dumai.

1.5 Kerangka Pemikiran

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Perkembangan teknologi informasi, sudah demikian pesatnya, sehingga sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan oleh sebagian organisasi perusahan, organisasi kemasyarakatan, partai politik termasuk juga oleh pemerintah. Penggunaan teknologi dalam pemerintahan, dikenal dengan nama sebutan *E-Government*, yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan, terutama dalam penyimpanan data dan memperluas akses publik sehingga terciptanya akuntabilitas dan terwujudnya *good governance*. Penggunaan teknologi dan informasi pada lembaga pemerintah akan berdampak pada peningkatan kinerja aparatur pemerintah dan menghasilkan kualitas kerja yang produktif dan tepat guna. Akan tetapi jika tidak diimbangi dengan kinerja yang efektif maka aplikasi *E-Government* tidak akan berjalan dengan sempurna.

Secara etimoligis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solihin Abdul Wahab adalah :

> Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu); dan *to give pratical effect to* atau untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu (Wahab, 2005 : 64).

Jadi sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan atau kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Berkaitan dengan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pada bagian ini Teori ini dibuat sesuai dengan pedoman dalam menganalisa masalah yang diteliti. Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul *Analisis Implementasi E-Government* mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi sebagai berikut:

> "Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan" (Wahab, 2001:65).

Berdasarkan pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang atau berkepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan atau merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan dan implementasi berisi suatu program untuk mencapai tujuan, nilai-nilai yang dilakukan melalui tindakan-tindakan yang terarah. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan atau merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Sistem Administrasi Kependudukan atau yang selanjutnya disebut SIAK adalah sistem informasi Nasional untuk memfasilitasi pelayanan Administrasi Kependudukan (Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil) dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang menerapkan : *RDMBS* atau *Relational Database Management Sistem* yaitu : Pencatatan suatu peristiwa kependudukan penduduk (Kelahiran, Kematian, Perkawinan, dan Perceraian dan Pengangkatan Anak dll) saling mempengaruhi hasil pencatatan, sehingga selalu terjadi penyesuaian data secara otomatis yang berimplikasi pada penertiban dokumen penduduk (data dinamis).

Kualitas pelayanan yang ada saat ini adalah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, dimana aparatur memfokuskan tujuan dan nilai - nilai yang ada pada fungsi pelayanan publik terhadap kepentingan masyarakat Hubungan yang ada pada SIAK dengan Implementasi dalam hal ini sangat berjalan dengan selaras karena bertujuan penting bagi kehidupan masyarakat sekarang yang mengikuti tingkat modernitas. Untuk itu, pemerintah atau aparatur pelaksana harus lebih bisa berbaur dengan masyarakat agar tujuan yang ingin dicapai dapat tercipta dan terealisasikan dengan baik.

Implikasi ini terlihat dari tindakan-tindakan aparatur yang lebih terkontrol dan terarah dalam pembuatan dokumen-dokumen kependudukan yang lebih bisa di tingkatkan lagi kedepannya. Tindakan-tindakan aparatur ini mengarah pada pencapaian yang ingin dicapai

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

bersama dan berdasarkan ketetapan yang telah diputuskan bersama pula. Tindakan-tindakan aparatur ini berupa :

1. Pengembangan sarana sistem informasi kependudukan dan catatan sipil

   Ikut mengembangkan sarana dan prasarana yang telah ada, menjadikan sistem ini lebih berguna bagi kepentingan masyarakat..

2. Pengembangan pengetahuan sumber daya manusia secara periodik dan dengan skala prioritas

   Terlihat dengan semakin tingginya minat aparatur itu sendiri dan penguasaan proses dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pembuatan dokumen kependudukan.

3. Penyajian data dan pemetaan tentang dokumen kependudukan yang valid

   Data-data kependudukan dipergunakan sebaik-baiknya dan langsung dikirim ke Bank Data sehingga data diproses secepatnya.

4. Komitmen untuk melayani masyarakat secara mudah dan professional (pelayanan prima)

   Aparatur bersikap lebih baik dari sebelumnya dengan masyarakat sehingga proses pembuatan dokumen kependudukan dapat diselesaikan dengan waktu sesingkat-singkatnya.

SIAK adalah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yaitu suatu sistem informasi yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem administrasi kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi di bidang

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

kependudukan. Administrasi kependudukan meliputi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Implementasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), yang telah diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) No 88/2004 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Permendagri No 18/2005 tentang Administrasi Kependudukan Pada hakekatnya bahwa upaya Tertib Dokumen Kependudukan atau Tertib Administrasi Kependudukan, tidak sekedar pengawasan terhadap pengadaan blangko-blangko yang dipersyaratkan dalam penerbitan dokumen, tapi hendaknya harus tersistem, konkrit dan pragmatis. Artinya mudah difahami oleh penduduk dan diyakini bermakna secara hukum berfungsi melindungi, mengakui atau mengesahkan status kependudukan atau peristiwa vital (vital event) yang dialami penduduk, sehingga dibutuhkan oleh penduduk karena dapat memudahkan atau melancarkan urusannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain dokumen kependudukan memiliki insentif atau benefit bagi si pemegang dokumen atau penduduk.

Tujuan adanya SIAK yaitu :

1. Database Kependudukan terpusat
2. Database Kependudukan dapat diintegrasikan untuk kepentingan lain, (Statistik, Pajak, Imigrasi dll)
3. System SIAK teringtegrasi (RT/RW\, Kelurahan, Kecamatan, Pendaftaran Catatan Sipil dll)
4. Standarisasi Nasional

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

a. Nomor Pengenal Tunggal atau NIK
b. Blangko Standar Nasional (KK, KTP, Buku, Register, Akta Capil)
c. Formiulir-formulir Standar Nasional (termasuk kodefikasinya)

Implementasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), yang telah diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) No 88/2004 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Permendagri No 18/2005 tentang Administrasi Kependudukan. Pada hakekatnya bahwa upaya Tertib Dokumen Kependudukan atau Tertib Administrasi Kependudukan, tidak sekedar pengawasan terhadap pengadaan blangko-blangko yang dipersyaratkan dalam penerbitan dokumen, tapi hendaknya harus tersistem, konkrit dan pragmatis.

Artinya mudah difahami oleh penduduk dan diyakini bermakna secara hukum berfungsi melindungi, mengakui atau mengesahkan status kependudukan atau peristiwa vital (vital event) yang dialami penduduk, sehingga dibutuhkan oleh penduduk karena dapat memudahkan atau melancarkan urusannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain dokumen kependudukan memiliki insentif atau benefit bagi si pemegang dokumen atau penduduk.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagai bagian dari sistem pemerintahan mempunyai peran strategis guna mendukung pembentukan pemerintahan yang akuntabel dalam :

1. Menerbitkan dokumen penduduk yang benar, cepat dan memberikan status yang jelas.

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2. Terhimpunnya data registrasi dengan cakupan yang luas dan dapat dimanfaatkan dalam pemerintahan dan pembangunan.

Pembangunan SIAK merupakan pembaharuan mendasar penyelenggaraan salah satu pelayanan publik yang diberikan kepada penduduk.

Keberhasilan Implementasi Sistem Administrasi Informasi Kependudukan dapat diukur dan dilihat dari proses pencapaian tujuan hasil akhir(output), yaitu tercapainya atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Merille Grindele, sebagai berikut :

> "Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksana program sesuai dengan apa yang telah ditentukan yaitu dengan melihat pada *action program* dari *individual projects* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut dapat tercapai". (Merille Grindele, dalam Agustino, 2006 : 153).

Penduduk atau warga suatu negara atau daerah bisa didefinisikan menjadi dua, yaitu :

1. Orang yang tinggal di daerah tersebut.
2. Orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut.

Dengan kata lain orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di situ. Misalkan bukti kewarganegaraan, tetapi memilih tinggal di daerah lain. Penduduk juga dapat diartikan sebagai Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kependudukan adalah hal - hal atau sifat sebagai penduduk, urusan mengenai penduduk (dinas kependudukan dan catatan sipil).

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Dokumen Kependudukan adalah Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dapat disimpulkan bahwa jika organisasi pemerintahan, ditata dengan benar dan disesuaiakan dengan kebutuhan organisasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip organisasi modern, yaitu mempunyai visi dan misi dengan jelas, maka akan dapat mempermudah kinerja aparatur pemerintahan. Keadaan seperti ini tentunya akan menciptakan pemerintahan yang responsibilitas, responsivitas, dan akuntabilitas sehingga dapat mewujudkan *good governance*. Setiap aparatur pemerintahan dalam menjalankan kinerjanya, harus selalu dilandasi dengan tanggungjawab, dalam melaksanakan tugasnya agar dapat menciptakan kualitas kinerja yang optimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pada umumnya. Sebuah lembaga pemerintah tidak lepas dari aparatur sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintahan, hal ini sesuai dengan pendapat Soerwono Handayaningrat yang mengatakan bahwa:

> "Aparatur ialah aspek-aspek administrasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan atau negara, sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Aspek-aspek administrasi itu terutama ialah kelembagaan atau organisasi dan kepegawaian" (Soewarno,1982 : 154).

Pada era otonomi daerah kinerja aparatur pemerintahan daerah harus lebih ditingkatkan. Terutama dengan adanya aplikasi di bidang teknologi pemerintahan yang dinamakan dengan *E-Government.* Oleh karena itu kesiapan aparatur perlu diseimbangkan dengan kualitas

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

sumber daya manusia yang mampu mengaplikasikan penerapan *E-Government*. *E-Government* itu sendiri memiliki arti menurut Edi Sutanta sebagai berikut :

> *E-Government* adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru, seperti pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah kepada pemerintah dan pemerintah kepada bisnis atau pengusaha. (Sutanta, 2003:150).

Dengan demikian munculnya *E-Government* dapat meningkatkan kinerja aparatur pemerintah. Karena dengan adanya aplikasi *E-Government* ini penyediaan sumber informasi, khususnya informasi mengenai kependudukan cepat terlaksana sehinga keterbukaan menjadi lebih efektif dan tidak adanya birokrasi yang berbelit belit.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka definisi operasional dalam laporan Kuliah Kerja Lapangan ini adalah sebagai berikut :

1. Sistem Administrasi Kependudukan atau yang selanjutnya disebut SIAK adalah sistem informasi Nasional untuk memfasilitasi pelayanan Administrasi Kependudukan (Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil) dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang menerapkan : RDMBS atau *Relational Database Management Sistem* yaitu : Pencatatan suatu peristiwa kependudukan penduduk (Kelahiran, Kematian, Perkawinan, dan Perceraian dan Pengangkatan Anak dll) saling mempengaruhi hasil pencatatan, sehingga selalu terjadi penyesuaian data secara

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

otomatis yang berimplikasi pada penertiban dokumen penduduk (data dinamis).

2. Implementasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) pada hakekatnya bahwa upaya Tertib Dokumen Kependudukan atau Tertib Administrasi Kependudukan, tidak sekedar pengawasan terhadap pengadaan blangko-blangko yang dipersyaratkan dalam penerbitan dokumen, tapi tersistem, konkrit dan pragmatis.

   Untuk mengukur suatu keberhasilan Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan tersebut, dapat dilihat dalam indikator sebagai berikut :

   1. Kualitas Pelayanan Publik

      Kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sangat mempengaruhi jalannya proses dinamis dalam pembuatan dokumen kependudukan. Bila kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dirasakan kurang memuaskan, maka akan terjadi kesalahan (miskomunikasi) antara aparatur dan mayarakat sehingga akan memperlambat proses pembuatan dokumen kependudukan. Adapun sasaran – sasaran yang bisa dicapai adalah :

      1. Terwujudnya penertiban NIK, KK, dan KTP secara nasional.

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2. Tersedianya data penduduk potensial memilih dari hasil pemuktahiran data berkelanjutan untuk mendukung Pemilu dan PILKADA.
3. Terwujudnya Database kependudukan nasional (Kab/Kota, Prov, dan Pusat untuk penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan oleh Departemen dan LPND serta unsur lain yang membutuhkan.

2. Indikator Kinerja Aparatur

Penetapan indikator kinerja dalam suatu kegiatan menjadi hal yang sangat penting, karena dalam setiap perencanaan kegiatan mempunyai maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Dengan adanya penetapan indikator kinerja, maka kinerja dari setiap aparatur dapat terkontrol dan lebih terarah lagi sehingga hasil yang ingin dicapai dapat lebih dikuasai.

Indikator kinerja dapat dikelompokkan dalam empat jenis, yaitu :

1. Indikator *Input*

   Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi kebijaksanaan atau peraturan perundang-undangan dan sebagainya.

2. Indikator *Output*

   Indikator ini dapat berupa fisik maupun non fisik.

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

3. Indikator *Benefits*

   Berupa sesuatu dari hasil akhir yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan

4. Indikator *Impact*

   Berupa pengaruh yang ditimbulkan dari perencanaan kegiatan yang telah ditetapkan baik itu yang positif ataupun negatif.

3. Pengelolaan Informasi Dokumen Kependudukan

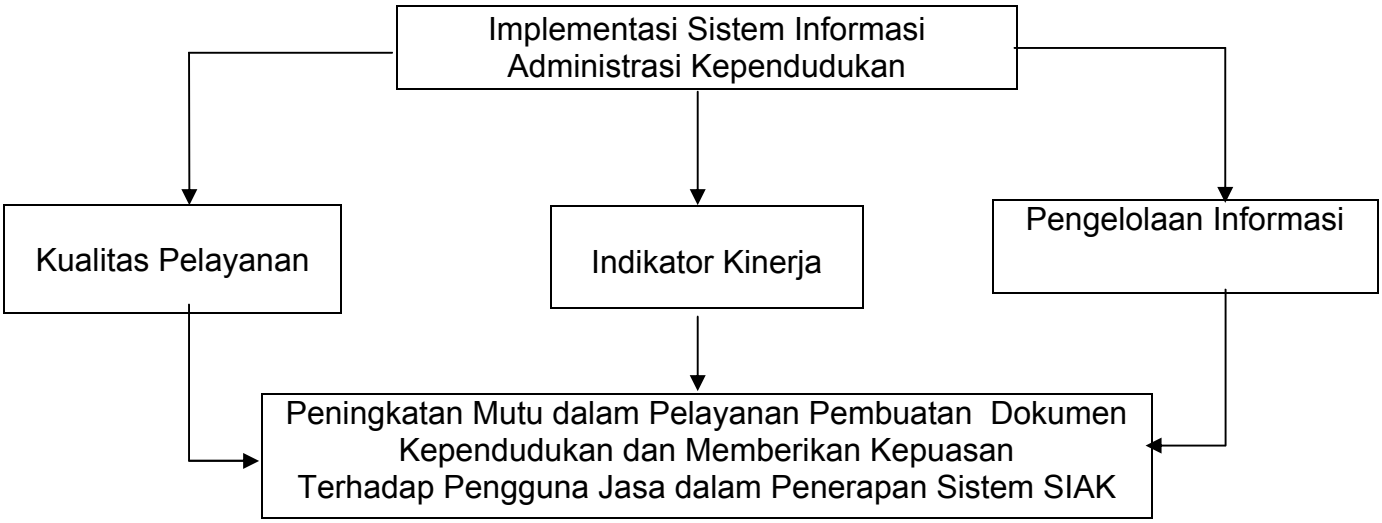
   Pengelolaan informasi menjadi dasar dalam setiap pelaksanaan kegiatan, karena setiap data yang masuk akan disampaikan atau di kirimkan ke Bank Data di pusat. Jika pengelolaan informasi ini mengalami hambatan atau kendala maka setiap kegiatan yang telah ditetapkan akan mengalami kegagalan karena informasi-informasi atau data-data yang ada tidak bisa di sampaikan ke pusat atau Bank Data.

   Pengelolaan informasi disini berupa :

   1. Pengiriman atau pengumpulan data hasil pendaftaran penduduk
   2. Pengiriman atau pengumpulan data hasil pencatatan sipil

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Gambar 1.2
Model Kerangka Pemikiran



1.6 Metode Laporan KKL

1.6.1 Metode Laporan KKL

Sesuai dengan masalah yang ditulis pada laporan KKL ini, khususnya yang berhubungan dengan yang terjadi sekarang, maka dasar-dasar yang digunakan adalah dengan mencari kebenaran dalam penulisan berdasarkan suatu metode. Metode tersebut dapat lebih mengarahkan penyusun dalam melakukan penulisan dan pengamatan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Pengertian penelitian deskriptif adalah:

> "Penelitian yang dimaksudkan untuk menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan situasi yang terjadi dan dialami sekarang, hubungan antar variabel, pertentangan dua kondisi atau lebih, pengaruh terhadap suatu kondisi, perbedaan-perbedaan antarfakta, dan lain-lain" (Subana, 2001:26).

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Metode penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih. Menurut Sanapiah Faisal dalam bukunya *Format-Format Penelitian Sosial,* menjelaskan bahwa penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah:

> "Untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Jenis penelitian ini tidak menggunakan dan tidak melakukan pengujian hipotesis, berarti tidak dimaksudkan untuk membangun dan mengembangkan perbendaharaan teori" (Faisal, 1999:20).

Penulis menggunakan metode deskriptif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang implementasi pemerintahan melalui SIAK dalam pembuatan dokumen kependudukan di Kota Dumai tahun 2010, serta mendeskripsikan sejumlah konsep yang berkenaan dengan masalah dokumen kependudukan tersebut. Berdasarkan metode tersebut, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu:

> "Pendekatan yang berupa deskripsi dari gejala-gejala yang diamati, tidak berbentuk angka-angka atau koefisien antarvariabel. Data yang dianalisis tidak untuk menerima atau menolak hipotesis, cenderung digunakan untuk gejala yang berhubungan dengan perilaku sosial/manusia dengan berbagai argumentasi" (Subana, 2001:17).

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena penulis mendeskripsikan teori-teori yang telah diperoleh selama perkuliahan dan dari hasil penelitian di lapangan dengan fakta-fakta yang ada yang

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

berhubungan dengan implementasi sistem informasi administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan berbagai macam data, untuk memperjelas usulan laporan Kuliah Kerja Lapangan data diperoleh melalui teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

   Penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara observasi yaitu menulis, melihat langsung ke lapangan dengan pengamatan dan mencatat terhadap gejala-gejala yang diteliti yang berhubungan dengan Kinerja Dinas Kependudukan dalam memberikan informasi kependudukan yang menjadi objek Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Dumai.

2. Studi Pustaka

   Penggunaan studi pustaka sangat dibutuhkan penulis untuk menambah wawasan berkenaan dengan teori-teori yang digunakan. Studi pustaka merupakan pengambilan data berupa referensi berdasarkan buku yang berkaitan dengan *e-Government*, dan didapat dari buku, artikel dan dokumentasi untuk dikumpulkan sebagai teori yang dijadikan landasan dalam menyusun laporan Kuliah Kerja Lapangan.

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

1.6.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang sesuai dengan penulisan ini adalah analisa deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai strategi penyelidikan yang naturalistis dan induktif dalam mendekati suatu suasana (*setting*) tanpa hipotesis-hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya. Teori muncul dari pengalaman kerja lapangan dan berakar (*grounded*) dalam data (Suyatna, 2005:183).

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan laporan ini ada tiga teknik, dikutip dari Sugiyono dalam bukunya yang berjudul Memahami Penelitian Kualitatif, ketiga teknik tersebut sebagai berikut:

1. Reduksi Data

   Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

   Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Penyajian data yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

yang bersifat naratif, dengan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

   Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum pasti sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal tetapi mungkin juga tidak karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penulis berada di lapangan.

1.7 Lokasi dan Waktu KKL

Lokasi yang dijadikan tempat Kuliah Kerja Lapangan yaitu Pemerintah Daerah Kota Dumai khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai yang beralamat di Jalan Sultan Syarif Kasim No. 14 Telepon (0765) 36940 Dumai 22822.

Adapun jadwal waktu KKL dimulai dari bulan Juli sampai November 2010 dapat dilihat pada tabel berikut:

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Tabel 1.1
Jadwal Kuliah Kerja Lapangan

NO	Uraian kegiatan	Tahun 2010				
		Juli	Agust	Sept	Okt	Nov
1.	Tahap Persiapan: a. Pengajuan Judul Penelitian					
	b. Pengajuan Usulan Penelitian					
	c. Pengajuan Surat ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai					
2.	Tahap Pelaksanaaan KKL					
3.	Tahap Akhir: a. Penulisan Laporan KKL					
	b. Pengumpulan Laporan KKL					

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional